

takan perempuan tani yang berdaya secara ekonomi apabila sikap mental masyarakat lemah, mudah putus asa serta tidak mandiri.

Perempuan tani di kelurahan Puuduria mengungkapkan, bahwa melalui bekerja bersama-sama dalam kelompok, membuat mereka merasa senang, dapat menciptakan kekeluargaan, sehingga meringankan pekerjaan mereka. Melalui kebersamaan yang tercipta selama mereka bekerja bersama, tentu saja dapat membentuk kemandirian sosial antara lain perempuan tani yang suka bekerja keras serta memiliki etos kerja dan disiplin yang baik. Keadaan yang terjadi secara terus-menerus lewat rutinitas program kerja kelompok tani setiap musim tanam, pada akhirnya akan membentuk perempuan tani yang mandiri, bermental kuat, tidak mudah putus asa dan sebagainya. Sikap mental seperti suka bekerja keras yang menjadi kekuatan dan ciri perempuan tani di kelurahan Puuduria, pada akhirnya akan membuat mereka secara optimal dapat melakukan semua pekerjaannya, sehingga di sisi lain mereka dapat memperoleh penghasilan yang cukup guna perbaikan ekonomi keluarganya. Pada akhirnya dapat menjauhkan perempuan tani dan keluarganya dari jurang kemiskinan.

Pemberdayaan perempuan tani dalam bidang ekonomi tak lepas dari pemberdayaannya di bidang politik. Masyarakat termasuk perempuan tani yang lemah secara politik sehingga perlu diberdayakan menurut Anonymous (2003) adalah masyarakat yang:

- a. Tidak memiliki peranan dalam proses pengambilan keputusan umum. Masyarakat hanya menjadi penonton dalam

proses pembangunan, karena semuanya diputuskan oleh pemerintah sendiri atau konsultan sendiri, atau hanya oleh pemerintah dan konsultan saja.

- b. Tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

Ciri masyarakat yang memiliki kelemahan di bidang politik tersebut, memang terlihat pada perempuan tani di kelurahan Puuduria, walaupun dalam skala kelompok tani. Perempuan tani memang cenderung lebih sebagai "penonton", bila sudah berbicara mengenai perencanaan maupun pengaturan aktivitas kelompok tani. Faktor penyebabnya, mungkin seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa umumnya perempuan tani di kelurahan Puuduria berlatar belakang pendidikan yang rendah. Jadi apabila sudah menyangkut rapat-rapat pengambilan keputusan ataupun pengaturan kerja, mereka lebih mempercayakan kepada kaum laki-laki, dengan anggapan bahwa apa yang telah diatur, sudah merupakan hal terbaik bagi mereka. Kondisi ini memang tidak memberi dampak signifikan karena anggota kelompok laki-laki umumnya adalah suami mereka sendiri, sehingga keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan mereka juga.

Pemberdayaan politik perempuan tani melalui proses pengambilan keputusan dalam kelompok tani pada akhirnya dapat menumbuhkan semangat serta membuka suatu ruang demokrasi bagi mereka. Hal ini bila berlangsung secara terus menerus tentu saja dapat membawa manfaat berupa peran perempuan tani dalam berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan dengan lingkup yang lebih luas.

Keterpaduan proses pemberdayaan perempuan tani baik bidang ekonomi, sosial maupun politik melalui keterlibatannya dalam wadah kelompok tani di kelurahan Puuduria, pada akhirnya bermuara pada perbaikan ekonomi dan taraf hidupnya. Eksistensi kelompok tani di kelurahan Puuduria yang secara konsisten melibatkan dan memberdayakan anggota perempuan tani, yang berarti tetap memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan tani untuk mencari nafkah, secara perlahan tapi pasti akan menciptakan perbaikan ekonomi perempuan tani dan keluarganya ke arah yang lebih baik. Jadi, bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar melainkan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupannya.

Peran pemerintah daerah kabupaten Konawe terhadap kegiatan kelompok khususnya pemberdayaan perempuan tani

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan perempuan tani dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan terhadap masyarakat yang tidak atau kurang berdaya, oleh pihak luar yang memiliki daya. Pihak luar yang dimaksud dalam konteks ini di antaranya adalah pemerintah. Peran pemerintah yang masih cukup sentral tersebut dapat dilihat dari sisi pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa menurut Schuffan (1996) pendekatan pemberdayaan masyarakat terdiri

atas empat bentuk, di mana salah satu di antaranya adalah pendekatan *Capacity Building* (pembangunan kapasitas). Keberhasilan dan efektivitas pendekatan pemberdayaan ini, sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Menurut Grindle (1997), *capacity building* difokuskan pada 3 dimensi, yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, berarti berkaitan dengan kajian ini adalah peningkatan SDM perempuan tani di kelurahan Puuduria. Tujuan pengembangan SDM adalah menyediakan SDM yang profesional dengan berfokus pada *training* atau pelatihan.
2. Penguatan Organisasi, dalam hal ini tentunya adalah kelompok tani yang ada di kelurahan Puuduria. Fokus dari upaya penguatan organisasi lebih pada sistem manajemennya. Keberhasilan proses ini sangat erat kaitannya dengan peran aktif PPL yang bertugas di wilayah kelurahan Puuduria.
3. Reformasi Kelembagaan, fokusnya adalah perubahan-perubahan struktur dan kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Konawe.

Ketiga proses dalam *capacity building* sebaiknya berjalan bersama guna berhasilnya pemberdayaan perempuan tani di kelurahan Puuduria. Fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa proses *capacity building* bagi perempuan tani di kelurahan Puuduria yang harusnya menjadi tugas pemerintah ternyata belum terjadi sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan sektor pertanian, termasuk kelompok tani selain pembangunan kapa-

sitas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga dapat berupa hal-hal lainnya. Menurut Mubyarto (1994) kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa kebijakan harga, kebijakan pemasaran dan kebijakan struktural.

Kebijakan harga bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan ini dapat berupa pemberian suatu penyangga (*support*) atas harga-harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani, misalnya subsidi pupuk, benih padi dan sebagainya. Kebijakan harga dapat dilakukan dengan jalan mengurangi penawaran maupun dengan menambah permintaan pasar.

Selain kebijakan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing petani. Jadi jelas bahwa kebijakan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Di satu pihak pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan para pedagang dan petani, tetapi di pihak lain persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Mekanisme pemasaran hasil pertanian dari kelompok tani yang terjadi di kelurahan Puuduria sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah melibatkan peda-

gang (tengkulak) yang biasanya langsung mendatangi petani pada saat panen berlangsung. Selain itu ada pula pemasaran yang dilakukan oleh petani sendiri yaitu sudah dalam bentuk beras ke pasar-pasar tradisional. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa belum ada kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe yang secara khusus mengatur dan melindungi pemasaran hasil petani, khususnya di kelurahan Puuduria.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah kebijakan struktural. Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru, dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Kebijakan struktural ini hanya dapat terlaksana dengan kerja sama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Pengenalan teknologi baru dengan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang intensif merupakan suatu contoh dari kebijakan ini. Hal tersebut berarti bahwa ada keterkaitan erat dengan pendekatan pemberdayaan yaitu pembangunan kapasitas (*capacity building*).

Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik apabila tidak diimplementasikan dengan baik, maka tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Konawe dalam bidang pertanian, akan berhasil diimplementasikan bila didukung oleh peran dan kinerja dinas/instansi terkait, termasuk pemerintah yang ada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan untuk memberdayakan perempuan tani dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pemerintah kecamatan Wonggeduku melalui instansi teknisnya yaitu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Wonggeduku adalah ujung tombak bagi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Konawe. BPP membagi penyuluh-penyuluhnya (PPL) untuk membina sektor pertanian di 22 desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Wonggeduku, termasuk kelurahan Puuduria.

Kebijakan pembangunan pertanian yang dirumuskan oleh departemen pertanian adalah mewujudkan pertanian tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan Agribisnis (Eko, 2005). Pendekatan ini mengharuskan para penyuluh pertanian melihat usaha yang dikelola oleh petani sebagai bagian dari sistem agribisnis. Kebijakan ini juga mensyaratkan dan dikembangkannya jaringan kerja sama di antara pelaku agribisnis, penyuluhan pertanian, penelitian, pendidikan dan pelatihan.

Peran aktif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bentuk berbagai program pengembangan bidang pertanian, antara lain diperlihatkan oleh bapak Sugiyono, yang diberikan tugas membina sektor pertanian termasuk kelompok

tani di kelurahan Puuduria. Secara rutin, PPL melakukan pendampingan dan pembinaan bagi kelompok-kelompok tani di kelurahan Puuduria. Selain fungsi pembinaan dan pendampingan, PPL tersebut juga melakukan peran dan fungsi koordinasi baik dengan pemerintah kelurahan maupun tingkat di atasnya, serta sebagai fasilitator maupun motivator.

Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa PPL kelurahan Puuduria tersebut belum melakukan upaya dalam memberdayakan perempuan tani secara khusus. Sistem dalam kelompok yang selama tetap didominasi oleh laki-laki tetap menjadi acuan bagi PPL dalam melakukan tugas-tugasnya. Hal ini mungkin bisa diperbaiki apabila ada kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Konawe khusus mengatur hal tersebut, sehingga upaya pemberdayaan perempuan tani di kelurahan Puuduria dapat lebih dioptimalkan.

Kehadiran pemerintah kelurahan Puuduria selaku pembina dan pelaksana dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ternyata belum juga menyentuh pemberdayaan perempuan tani yang ada di kelurahan Puuduria. Pemerintah kelurahan masih memandang bahwa kehadiran perempuan tani merupakan bagian integral dari kelompok tani. Jadi dengan memberdayakan kelompok tani, maka berarti bahwa perempuan tani di dalamnya telah ikut pula di berdayakan.

Peran pemerintah kelurahan Puuduria lebih kepada pertemuan evaluasi dengan kelompok tani secara rutin, guna mendeteksi